

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 227 kabupaten/kota yang menurut Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP) tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan selama tahun 2012. Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini disajikan pada table berikut:.

TABEL 4.1.  
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2013	440
Pemerintah daerah yang menurut Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP) tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan	(3)
Pemerintah daerah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2012	(200)
Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data lengkap sesuai kebutuhan penelitian	(10)
	227

#### A. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian yang digolongkan berdasarkan pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.2.  
Hasil Analisis Deskriptif

## Panel A

Variabel	Frekuensi	Persentase
SPES		
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan pengungkapan atas belanja bantuan sosial		
- Latar belakang selain bidang ekonomi	84	87,5
- Latar belakang bidang ekonomi	12	12,5
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengungkapan atas belanja bantuan sosial		
- Latar belakang selain bidang ekonomi	117	89,3
- Latar belakang bidang ekonomi	14	10,7

## Panel B

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan pengungkapan atas belanja bantuan sosial					
FISCAL	96	0,089	1,854	0,49238	0,332009
DPRD	96	20	70	32,97	12,473
SKPD	96	17	28	18,93	2,803
LN ASSET	96	24,537	29,222	27,82905	0,753010
AGES	96	2	38	21,64	8,790
PAD	96	0,015	0,295	0,06258	0,044807
DEBTFIN	96	0	0,165	0,01057	0,020269
INTREV	96	0,05	0,73	0,5326	0,15966
LN POP	96	9,284	13,870	12,22678	1,062477
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengungkapan atas belanja bantuan sosial					
FISCAL	131	0,055	2,861	0,59549	0,464197
DPRD	131	20	255	59,96	38,975
SKPD	131	17	35	19,31	3,641
LN ASSET	131	26,333	31,116	28,22373	0,672046
AGES	131	14	57	27,81	7,369
PAD	131	0,020	0,502	0,09425	0,081573
DEBTFIN	131	0	0,065	0,00663	0,009768
INTREV	131	0,18	0,74	0,5409	0,11258
LN POP	131	10,992	15,378	13,22187	0,951456

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.2 panel A menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan atas belanja bantuan sosial sebanyak 84 (87,5%) kepala daerahnya memiliki latar belakang pendidikan selain bidang ekonomi, sedangkan yang memiliki latar belakang pendidikan bidang

ekonomi sebanyak 12 (12,5%). Pada kelompok Kabupaten/Kota yang melakukan pengungkapan atas belanja bantuan sosial sebanyak 117 (89,3%), kepala daerahnya memiliki latar belakang pendidikan selain bidang ekonomi, sedangkan yang memiliki latar belakang pendidikan bidang ekonomi sebanyak 14 (10,7%).

Tabel 4.2 panel B menunjukkan bahwa pada kelompok Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pengungkapan atas belanja bantuan sosial kapasitas fiskal (FISCAL) memiliki rata-rata sebesar 0,492 dengan standar deviasi sebesar 0,332. Ukuran legislative (DPRD) memiliki rata-rata sebesar 32,97 dengan standar deviasi sebesar 12,473.. Diferensiasi fungsional (SKPD) memiliki rata-rata sebesar 19,93 dengan standar deviasi sebesar 2,803. Ukuran Pemerintah daerah (LN ASSET) memiliki rata-rata sebesar 27,829 dengan standar deviasi sebesar 0,753. Umur pemerintah daerah (AGES) memiliki rata-rata sebesar 21,64 dengan standar deviasi sebesar 8,790. Rasio kamandirian daerah (PAD) memiliki rata-rata sebesar 0,0626 dengan standar deviasi sebesar 0,0448. Pembiayaan utang (DEBTFIN) memiliki rata-rata sebesar 0,011 dengan standar deviasi sebesar 0,020. *Intergovernmental revenue* (INTREV) memiliki rata-rata sebesar 0,533 dengan standar deviasi sebesar 0,160. Jumlah penduduk (Ln POP) memiliki rata-rata sebesar 12,227 dengan standar deviasi sebesar 1,062.

Pada kelompok Kabupaten/Kota yang melakukan pengungkapan atas belanja bantuan sosial kapasitas fiskal (FISCAL) memiliki rata-rata sebesar 0,595 dengan standar deviasi sebesar 0,464. Ukuran legislative (DPRD)

memiliki rata-rata sebesar 59,96 dengan standar deviasi sebesar 38,98.. Diferensiasi fungsional (SKPD) memiliki rata-rata sebesar 19,31 dengan standar deviasi sebesar 3,641. Ukuran Pemerintah daerah (LN ASSET) memiliki rata-rata sebesar 28,224 dengan standar deviasi sebesar 0,672. Umur pemerintah daerah (AGES) memiliki rata-rata sebesar 27,81 dengan standar deviasi sebesar 7,369. Rasio kemandirian daerah (PAD) memiliki rata-rata sebesar 0,094 dengan standar deviasi sebesar 0,812.. Pembiayaan utang (DEBTFIN) memiliki rata-rata sebesar 0,007 dengan standar deviasi sebesar 0,010. *Intergovernmental revenue* (INTREV) memiliki rata-rata sebesar 0,541 dengan standar deviasi sebesar 0,113. Jumlah penduduk (Ln POP) memiliki rata-rata sebesar 13,222 dengan standar deviasi sebesar 0,951.

#### **B. Hasil Penelitian (Uji Kualitas Data dan Uji Hipotesis)**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi logistik untuk menguji pengaruh kapasitas fiskal (FISCAL), legislative size (DPRD), diferensiasi fungsional (SKPD), spesialisasi pekerjaan (SPES), ukuran pemerintah daerah (LN ASSET), umur pemerintah daerah (AGES), rasio kemandirian daerah (PAD), pembiayaan utang (DEBTFIN), intergovernmental revenue (INTREV) dan jumlah penduduk (LN POP) terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial (PDISC\_BANSOS).

## 1. Pengujian Kelayakan Model Regresi

Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan *Goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-Square* pada bagian bawah uji *Hosmer* dan *Lemeshow*.

TABEL 4.3.  
*Hosmer dan Lemeshow Test*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3,207	8	0,921

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.3 memperlihatkan nilai *p-value* sebesar  $0,921 > 0,05$ , berarti model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

## 2. Menilai Model Fit

Pengujian model *fit* dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada awal (*Block Number=0*) dengan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada akhir (*Block Number=1*). Adanya pengurangan nilai antara *-2 LL* awal (*initial -2LL function*) dengan nilai *-2LL* pada langkah berikutnya (*-2LL* akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

TABEL 4.4.  
Perbandingan Nilai *-2LL* Awal dengan *-2LL* Akhir

<i>-2 Log Likelihood</i>	Nilai
Awal ( <i>Block Number=0</i> )	309,271
Akhir ( <i>Block Number=1</i> )	207,025

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.4 memperlihatkan angka  $-2LL$  awal (*Block Number=0*) sebesar 309,271, sedangkan angka  $-2LL$  akhir (*Block Number=1*) mengalami penurunan menjadi 207,025. Penurunan *likelihood* ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

### 3. Koefisien Determinasi

Nilai *Nagelkerke R square* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R square* pada regresi berganda (Ghozali, 2006). Hasil perhitungan nilai *Nagelkerke R square* disajikan pada tabel 4.5 berikut:

TABEL 4.5.  
Nilai *Nagelkerke R Square*

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	207,025	0,363	0,487

Sumber: Hasil analisis data.

Tabel 4.5 memperlihatkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,487 yang berarti variasi pengungkapan atas belanja bantuan sosial yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel kapasitas fiskal (FISCAL), legislative size (DPRD), diferensiasi fungsional (SKPD), spesialisasi pekerjaan (SPES), ukuran pemerintah daerah (LN ASSET), umur pemerintah daerah (AGES), rasio kemandirian daerah (PAD), pembiayaan utang (DEBTFIN), intergovernmental revenue (INTREV) dan jumlah penduduk (LN POP) adalah sebesar 48,7 persen, sedangkan sisanya 51,3 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

#### 4. Matrik Klasifikasi

Matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi ketepatan penyampaian laporan keuangan.

TABEL 4.6.  
Matrik Klasifikasi

Observed		Predicted		Percentage Correct
		Pengungkapan bantuan sosial		
		Tdk mengungkapkan	Mengungkapkan	
Step 1	Pengungkapan atas belanja bantuan sosial	68	28	70,8
	Tidak mengungkapkan	23	108	82,4
Overall Percentage				77,5

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.6 memperlihatkan kekuatan prediksi untuk memprediksi pengungkapan atas belanja bantuan sosial adalah sebesar 90,8 persen. Kekuatan prediksi model untuk Kabupaten/Kota yang tidak mengungkapkan belanja bantuan sosial adalah sebesar 70,8%, yang berarti bahwa dengan model regresi yang diajukan sebanyak 68 observasi diprediksi akan melakukan pengungkapan belanja bantuan sosial. Sedangkan kekuatan prediksi model untuk Kabupaten/Kota yang melakukan pengungkapan belanja bantuan sosial adalah sebesar 82,4%, yang berarti bahwa dengan model regresi yang diajukan sebanyak 23 observasi diprediksikan tidak akan melakukan pengungkapan belanja bantuan sosial.

#### 5. Menguji Koefisien Regresi

Hasil pengujian koefisien regresi logistik pada tingkat signifikansi 5 persen disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.7.  
Koefisien Regresi

	B	Wald	Sig.	Exp (B)
Constant	-20,148	10,454	0,054	0,000
FISCAL	3,542	0,762	0,000	34,537
DPRD	0,042	0,021	0,042	1,042
SKPD	-0,066	0,061	0,273	0,936
SPES	-0,708	0,633	0,263	0,493
LNASSETS	0,138	0,326	0,673	1,148
AGES	0,051	0,025	0,041	1,052
PAD	-4,297	3,736	0,250	0,014
DEBTFIN	-4,635	14,009	0,741	0,010
INTREF	3,639	1,770	0,040	38,070
LNPOP	0,895	0,433	0,039	2,448

Sumber: Hasil analisis data

Hasil perhitungan Tabel 4.7 diperoleh model *logistic regression* sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{\text{TL}}{1-\text{TL}} = -20,148 + 3,542 \text{ FISCAL} + 0,042 \text{ DPRD} + 3,639 \text{ INTREF} + 0,895 \text{ LNPOP}$$

1) Pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ )

Variabel kapasitas fiscal (FISCAL) mempunyai koefisien 3,542 dan secara statistik signifikan (sig 0,000 <  $\alpha$  0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiscal berpengaruh positif terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_1$  diterima).

2) Pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ )

Variabel legislative size (DPRD) mempunyai koefisien 0,042 dan secara statistik signifikan (sig 0,042 <  $\alpha$  0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_2$  diterima).



3) Pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ )

Variabel diferensiasi fungsional (SKPD) mempunyai koefisien -0,066 dan secara statistik tidak signifikan ( $\text{sig } 0,273 > \alpha 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa diferensiasi fungsional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_3$  tidak diterima/ditolak).

4) Pengujian hipotesis keempat ( $H_4$ )

Variabel spesialisasi pekerjaan (SPES), mempunyai koefisien -0,708 dan secara statistik tidak signifikan ( $\text{sig } 0,263 > \alpha 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_4$  tidak diterima/ditolak).

5) Pengujian hipotesis kelima ( $H_5$ )

Variabel ukuran pemerintah daerah (LN ASSET) mempunyai koefisien 0,138 dan secara statistik tidak signifikan ( $\text{sig } 0,673 > \alpha 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_5$  tidak diterima/ditolak).

6) Pengujian hipotesis keenam ( $H_6$ )

Variabel umur pemerintah daerah (AGES) mempunyai koefisien 0,51 dan secara statistik signifikan ( $\text{sig } 0,041 < \alpha 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_6$  diterima).

7) Pengujian hipotesis ketujuh ( $H_5$ )

Variabel rasio kemandirian daerah (PAD) mempunyai koefisien -4,297 dan secara statistik tidak signifikan ( $\text{sig } 0,250 > \alpha 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_7$  tidak diterima/ditolak).

8) Pengujian hipotesis kedelapan ( $H_8$ )

Variabel pembiayaan utang (DEBTFIN) mempunyai koefisien -4,635 dan secara statistik tidak signifikan ( $\text{sig } 0,741 > \alpha 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_8$  tidak diterima/ditolak).

9) Pengujian hipotesis kesembilan ( $H_9$ )

Variabel *intergovernmental revenue* (INTREV) mempunyai koefisien 3,639 dan secara statistik signifikan ( $\text{sig } 0,040 < \alpha 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_9$  diterima).

10) Pengujian hipotesis kesepuluh ( $H_{10}$ )

Variabel jumlah penduduk (LN POP) mempunyai koefisien 0,895 dan secara statistik signifikan ( $\text{sig } 0,039 < \alpha 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan atas belanja bantuan sosial. ( $H_{10}$  diterima).

### C. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar kapasitas fiskal akan meningkatkan kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada dari suatu daerah. Dengan demikian, logika yang sama dapat juga diterapkan pada pengungkapan yang dilakukan suatu Pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yon (2010) yang menemukan pengaruh signifikan dari komponen kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi. Namun berbeda dengan penelitian Darmastuti dan Setyaningrum (2011) yang menunjukkan kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan *legislature Size* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab dalam mengungkapkan informasi akuntansi sesuai dengan ketentuan SAP. Hasil penelitian ini sesuai dengan Suhardjanto dan

Yulianingtyas (2011) yang menemukan adanya pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan diferensiasi fungsional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah SKPD proses kooperasi dan koordinasi antar SKPD akan semakin rumit. Kondisi tersebut akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengontrol kepatuhan pengungkapan belanja bantuan sosial oleh tiap SKPD. Hasil penelitian ini sesuai dengan Darmastuti dan Setyaningrum (2011) yang menunjukkan diferensi fungsional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Seharusnya kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi, termasuk akuntansi lebih dapat mengelola keuangan daerah secara lebih baik, tetapi pada kenyataannya masih banyak kepala daerah yang bukan berlatar belakang ekonomi. Dengan demikian, latar belakang pendidikan kepala daerah dan atau wakilnya tidak memberikan dorongan untuk melakukan pengungkapan belanja bantuan sosial. Hasil penelitian ini sesuai dengan Darmastuti dan Setyaningrum (2011) yang menunjukkan spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan ukuran Pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan size yang besar memiliki masalah birokrasi yang lebih besar, sehingga mengakibatkan proses penerapan SAP lebih rumit jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang kecil. Organisasi dengan size yang lebih kecil memiliki sifat yang lebih fleksibel. Hasil penelitian ini sesuai dengan Darmastuti dan Setyaningrum (2011) yang menunjukkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Namun berbeda dengan penelitian Puspita dan Martani (2011) yang menemukan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin lama suatu Pemerintah daerah terbentuk, maka Pemerintah daerah tersebut semakin berpengalaman dan pengalaman tersebut menjadi keunggulan dari Pemerintah dalam menjalankan sistem administrasinya termasuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Darmastuti dan Setyaningrum (2011) yang menunjukkan umur pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan belanja

bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah menunjukkan semakin mandiri pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga ketergantungan terhadap pihak eksternal menjadi rendah. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya karena rendahnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas LKPD dari pihak eksternal. Hasil penelitian ini berbeda dengan Lesmana (2010) yang menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun sesuai dengan Darmastuti dan Setyaningrum (2011) yang menunjukkan rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan pembiayaan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Kreditor yang memberikan pinjaman kepada debitur membutuhkan informasi yang lengkap agar dapat memprediksi bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Akan tetapi, pembiayaan utang yang terjadi di pemerintah daerah itu sangat kecil, dapat dilihat dari table statistic deskriptif bahwa nilai rata-rata pembiayaan utang pada kelompok yang melakukan pengungkapan bantuan sosial dan tidak

melakukan pengungkapan bantuan sosial masing-masing hanya sebesar 1,1% dan 0,66%. Artinya bahwa kegiatan pemerintah yang dibiayai dengan hutang jumlahnya sangat kecil dan tidak semua daerah melakukan pembiayaan kegiatannya dengan utang. Dengan demikian, adanya pembiayaan utang tidak memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya karena rata-rata pembiayaan utang sangat kecil. Hasil penelitian ini sesuai dengan Lesmana (2010) serta Darmastuti dan Setyaningrum (2011) yang menunjukkan pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Pengujian hipotesis kesembilan menunjukkan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal pembelanjaan dana perimbangan, Pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Meskipun Pemerintah pusat sebagai penyedia dana perimbangan tidak secara langsung membutuhkan pelaporan keuangan dari Pemerintah daerah, tapi Pemerintah pusat akan meminta suatu bentuk akuntabilitas dari Pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan akuntabilitasnya dengan melakukan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lengkap, termasuk pengungkapan rincian atas belanja bantuan sosial. Hasil penelitian ini sesuai dengan Suhardjanto (2010) dalam Sumarjo (2010) serta Darmastuti dan Setyaningrum (2011) yang menunjukkan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.

Pengujian hipotesis kesepuluh menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar pengungkapan yang harus mereka lakukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Liestiani (2008) yang menemukan bahwa jumlah penduduk berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan.